**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Dalam Perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini tergolong kepada sektor rill dalam perekonomian, dimana sektor rill inilah yang memiliki daya tahan yang tinggi terhadap krisis global. Berdasarkan data BPS di Indonesia dari tahun 1997 hingga pada tahun 1998 menunjukkan bahwa UMKM dapat bertahan terhadap serangan krisis global.

UMKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM dapat meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Joseph Alois Schumpeter seorang ahli ekonomi Amerika bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kewirausahaan *(entrepreneurship)* dimana UMKM termasuk di dalamnya.

UMKM menyediakan penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia, yaitu penganggguran. Menurut BPS tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,28 persen dibandingkan dengan keadaan Agustus 2016 dan turun sebesar 0,17 persen dibandingkan Februari 2016.

Pemerintah harus mendukung dan memberikan fasilitas bagi warga Indonesia yang menjalankan usaha mandiri. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan modal berupa Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM), dan memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi warga Indonesia agar penduduk Indonesia memiliki keterampilan yang memadai untuk membuka usaha mandiri. Dengan demikian, semakin banyak penduduk Indonesia yang dapat berwirausaha sendiri membuka lapangan pekerjaan, masalah pengangguran dapat teratasi.

Walaupun perkembangan UMKM cukup meningkat, namun dalam menjalankan aktivitas usahanya seringkali pengelola usaha merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi pada operasional usahanya. Kesulitan ini menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang dicapai oleh setiap usahanya. Apalagi jika harus dilakukan pengukuran dan penilaian atas aktivitas yang terjadi dalam kegiatan usaha. Pencatatan dilakukan hanya dengan menulis dan menghitung selisih antara uang masuk dan uang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu apakah untuk kegiatan usaha atau kegiatan non usaha. Kebanyakan pelaku UMKM hanya menghitung harta yang dimikiki sebatas uang kas yang dipegang saja. Mereka tidak memahami bahwa pengertian harta atau asset lebih luas dari sekedar uang kas saja (Anak Suryo : 2006).

Sering kali dalam skala UMKM hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan lebih besar dari pada pengeluaran. Padahal indicator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, tetapi diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan usaha yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.

Setiap usaha diharapkan memiliki laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Praktek akuntansi pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan dari pemilik usaha dan tidak adanya peraturan yang mewajibkan pemilik usaha menyusun laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik usaha dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada laba semata.

Semakin berkembangnya usaha, menuntut usaha kecil mikro kecil dan menengah untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan, pelaku usaha akan berhubungan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Menurut data statistik Bank Indonesia mengenai net ekspansi kredit UMKM pada bulan April 2013, menunjukkan bahwa net ekpansi kredit yang diberikan pada UMKM secara keseluruhan mencapai 17.670,2 miliar rupiah, dimana jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan april 2012 sejumlah 11.830,9 miliar rupiah. Walaupun terjadi peningkatan pada April 2012 ke April 2013, namun jumlah ini masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan Juni 2012 yang mencapai 50.530,3 miliar rupiah. Pembiayaan yang diberikan dari sektor formal seperti perbankan terhadap UMKM jelas tergolong masih rendah, hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman dari sektor formal seperti perbankan dimana masyarakat harus mengikuti berbagai macam alur administrasi dan pengembalian pokok hutang dengan bunga yang cukup besar dan juga pihak perbankan akan mensyaratkan laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kelayakan kredit dari UMKM tersebut.

Dengan demikian, semakin berkembangnya usaha menuntut para pelaku UMKM untuk menyediakan laporan keuangannya dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku agar pelaku UMKM dapat dengan mudah melakukan ekspansi kredit guna pengembangan usaha.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para akuntan profesional di Indonesia. IAI juga bertanggung jawab terhadap penyusunan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yaitu SAK EMKM.

SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan khusus untuk entitas mikro, kecil dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP yang sebelumnya digunakan oleh pelaku usaha UMKM. Dari segi teknikal, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat asset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya.

RM Kembang chi chi Tomohon adalah sebuah entitas yang dapat diklasifikasikan kedalam usaha mikro, kecil dan menengah. Entitas ini belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Entitas hanya mencatat arus kas yang masuk dan keluar kedalam buku kas saja. Kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha tentang pentingnya penerapan akuntansi bagi entitas menjadi salah satu penyebab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik membantu para pelaku usaha dengan membuat penelitian ini yang berjudul “Desain model akuntansi usaha rumah kopi berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah. Studi kasus pada RM. Kembang chi chi Tomohon”.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat perumusan dalam penelitian ini yakni: Bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk entitas UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah bagi RM. Kembang chi-chi Tomohon?

1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun laporan keuangan bagi entitas UMKM berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah di RM. Kembang chi-chi Tomohon.

1. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pemahaman tentang rancangan penerapan model akuntansi berdasarkan SAK EMKM untuk usaha mikro kecil dan menengah.
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis dan pelaku usaha dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang diharapkan berdampak pada pengembangan usaha.
3. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama ini sehingga dapat memperdalam tentang penelitian dan menambah wawasan serta pemahaman yang lebih baik.
4. Sebagai bahan masukan atau sumbangan informasi terhadap pelaku bisnis dan pelaku usaha mengenai penerapan SAK EMKM pada UMKM
5. Sebagai bahan informasi kepada akademisi dan masyarakat mengenai penerapan SAK EMKM pada UMKM